

**REFERENDUM *BREXIT* DAN KEMBALI MENGENGEMUKANYA  
KEDAULATAN NEGARA SERTA DAMPAKNYA  
BAGI DUNIA DAN INDONESIA**

**Hartanto**

Dosen Tetap Program Studi S-1 Hubungan Internasional  
Universitas Respati Yogyakarta, Depok, Sleman, Yogyakarta 55281  
e-mail: [tanto0072000@gmail.com](mailto:tanto0072000@gmail.com)

**ABSTRAK**

Makalah ini berisi kupasan mengenai fenomena Brexit dilihat dari titik-pandang hubungan internasional. Referendum Brexit menjadi jalan bagi Inggris untuk melepaskan diri dari persekutuan Uni Eropa. Kedudukan Inggris yang belum pernah menjadi anggota memberikan dampak baik negative ataupun positif. Pilihan untuk mundur dari persekutuan hendaknya dihormati, namun demikian, dalam segi hubungan internasional hal ini berarti pula diinterpretasi sebagai penemuan kembali tentang makna dipandang dari perspektif realism—hal yang selama ini dianggap sudah kuno. Kini Inggris lebih memprioritaskan kedaulatan internal negaranya.

**Kata kunci:** Brexit, Referendum, Kedaulatan

**ABSTRACT**

This article attempts to explain the Brexit phenomenon from the standpoint of international relations. The Brexit referendum is a milestone of the UK that decide to leave from the European Union, which has never been a member country that came out before, of course, provide a very spacious negative and positive impacts for the England, the United Kingdom and of course the rest of the World. England's choice to withdraw from membership in the European Union of course should be respected, but if the terms of the International Relations science it can be interpreted as a discovery of meaning back from the perspective of realism that has long been considered obsolete and is currently the England prefer to give priority to the country's sovereignty.

**Keywords:** Brexit, Referendum, Sovereignty

## **1. PENDAHULUAN**

Uni Eropa (UE) merupakan sebuah entitas organisasi regional yang dianggap paling maju saat ini. Bahkan Krasner (1999: 235) seorang realis yang sangat percaya bahwa negara berdaulat saat ini masih sedominan di masa lalu, mengakui bahwa Uni Eropa adalah sesuatu yang berbeda. Uni Eropa adalah entitas yang unik dan bukanlah model yang bisa ditiru oleh belahan dunia lain dari sisi wilayah, pengakuan, kontrol, otoritas nasional, otoritas ekstra-nasional, dan otoritas supra nasional. Namun pada akhirnya pengakuan Krasner tersebut seperti luruh dengan keluarnya Inggris dari keanggotaan Uni Eropa, keluarnya Inggris dari keanggotaan Uni Eropa seperti memberikan sebuah fakta bahwa negara berdaulat masih dominan pada saat ini, seperti yang dipercayai oleh kaum realis dan salah satunya adalah Krasner. Inggris pada 23 Juni 2016 lalu memutuskan untuk keluar dari keanggotaan Uni Eropa atau kita mengenalnya dengan istilah *British Exit* (*Brexit*). Keluarnya Inggris dari keanggotaan Uni Eropa tentunya menimbulkan banyak perdebatan di kalangan Pemerintahan, Akademisi maupun praktisi yang memiliki perhatian pada fenomena tersebut (Sevcikova, 2016).

Oleh karena itu dalam artikel ini pun penulis mencoba untuk menganalisa fenomena *British Exit* (*Brexit*) dari sudut pandang ilmu hubungan internasional, beberapa pertanyaan yang ingin dijawab dalam artikel ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengapa Inggris memutuskan untuk keluar dari keanggotaan Uni Eropa?
- b. Apa dampak positif dan negatif dari keputusan tersebut terhadap kondisi dalam negeri Inggris?
- c. Apa dampak positif dan negatif dari keputusan tersebut terhadap Eropa dan Dunia serta Indonesia?
- d. Akankah Inggris Raya yang terdiri dari England, Wales, Skotlandia dan Irlandia Utara tetap utuh?

## **2. INGGRIS DAN UNI EROPA**

Integrasi Eropa diilhami oleh kondisi Eropa paska Perang Dunia II berakhir, ketika itu para pemimpin dan masyarakat Eropa memiliki kesimpulan bahwa setelah terjadi peristiwa tiga perang besar dalam kurun waktu satu abad, telah tiba waktunya untuk membangun sebuah struktur baru di Eropa untuk mencegah terjadinya perang besar yang bisa saja terjadi di masa depan. Integrasi Uni Eropa diawali Schumann Plan yang kemudian menjadi dasar bagi terbentuknya Masyarakat Batu Bara dan Baja Eropa (*European Coal and Steel Community/ECSC*) pada tahun 1951. Kemudian pada tahun 1957 disepakati *Treaty of Rome* yang menghasilkan Masyarakat Energi Atom Eropa (*European Atomic Energy Community/EURATOM*)

untuk menampung sumber-sumber energi atom untuk tujuan damai dan Masyarakat Ekonomi Eropa (European Economic Community/EEC) atau Pasar Bersama Eropa. Langkah berikutnya adalah disepakatinya Merger Treaty pada tahun 1967 yang menggabungkan institusi-institusi ECSC, EEC dan EURATOM menjadi sebuah institusi yang disebut sebagai Masyarakat Eropa (European Community/EC). Perjanjian Maastricht (*Maastricht Treaty*) tahun 1992 merupakan sebuah langkah yang lebih besar, yang secara resmi membentuk Uni Eropa (The Economist, August 26, 2006). Uni Eropa merupakan sebuah organisasi kawasan dimana negara-negara anggotanya menyerahkan sebagian kedaulatannya. Namun sejarah Eropa yang unik menimbulkan keraguan tentang apakah UE akan menjadi model bagi integrasi kawasan di benua lain. Keraguan tersebut kini terjawab dengan keluarnya Inggris dari keanggotaan UE.

Setelah Perang Dunia II berakhir pada 1945, Inggris menolak untuk bergabung dengan lembaga baru bentukan sejumlah negara Eropa. Lembaga ini mendorong pada kerja sama dan hubungan damai. Inggris lebih tertarik untuk fokus pada sektor perdagangan dan investasi dengan sejumlah mantan koloninya, seperti AS, India, Kanada, dan Australia. Hal lain yang membuat Inggris awalnya tidak mau bergabung, karena khawatir akan kehilangan kemerdekaan kedaulatannya, dan, sebaliknya menginisiasi sebuah kelompok perdagangan bebas yang lemah bernama Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa (*European Free Trade Association*). Meskipun Inggris mengubah pandangannya pada tahun 1961, upaya-upaya untuk mengintegrasikan diri ke dalam EEC pernah mendapatkan veto dua kali oleh Presiden Prancis, Charles de Gaulle. Setelah de Gaulle digantikan Felix Gouin pada Tahun 1967, Inggris kembali mengajukan permohonan untuk menjadi anggota UE. Permohonan itu diterima dan Inggris resmi bergabung dengan zona perdagangan bebas UE pada 1973 bersamaan dengan Denmark serta Irlandia (Jensen dan Snaith, 2016).

## **2.1. Keluarnya Inggris dari Uni Eropa**

Inggris baru saja menggelar referendum pada 23 Juni 2016 lalu, dengan hasil memutuskan mereka memilih untuk meninggalkan Uni Eropa. Sebanyak 52% pemilih memberikan suara untuk meninggalkan Uni Eropa berbanding 48% yang memilih untuk tetap bergabung. Referendum serupa terakhir kali diadakan pada 41 tahun yang lalu. Pada tahun 1975, pemerintahan Partai Buruh yang berkuasa mengadakan referendum apakah Inggris harus meninggalkan apa yang kemudian dikenal sebagai Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE), cikal bakal Uni Eropa (UE). Saat itu, referendum menghasilkan kemenangan bagi pendukung yang menginginkan Inggris tetap berada di MEE dengan persentase 67% berbanding 33% dengan jumlah pemilih 64,5% (SindoNews.com, 24 Juni 2016).

Upaya Partai Buruh memenangkan pemilu pada tahun 1983 dengan platform akan menarik diri dari MEE mengakibatkan kegagalan dimana pemerintah Partai Konservatif yang dipimpin oleh Margaret Thatcher terpilih kembali dengan selisih yang cukup jauh. Empat belas tahun kemudian, empat tahun setelah MEE menjadi UE melalui Perjanjian Maastricht (*Maastricht Treaty*) pada 1992, referendum partai baru terbentuk atas usulan Sir James Goldsmith pada pemilihan umum 1997. Isu yang diangkat pun tetap sama tentang keanggotaan Inggris di UE. Alhasil, hanya 2,6% suara yang mendukung wacana tersebut dan gagal mendapatkan satu kursi di parlemen (Dhingra et al, 2016).

Perdana Menteri Inggris saat ini, David Cameron menolak seruan referendum terkait keanggotaan Inggris di UE pada tahun 2012. Namun, kurang dari satu tahun kemudian, pemerintah Konservatif berjanji akan mengadakan referendum jika terpilih kembali pada tahun 2015. Saat Cameron terpilih untuk masa jabatan kedua, UU Referendum Uni Eropa diperkenalkan di parlemen Inggris sebagai awal dari proses Referendum. Selanjutnya, dalam pidato kepada parlemen *House of Commons* pada bulan Februari 2016, Cameron mengumumkan bahwa referendum akan diselenggarakan pada 23 Juni 2016. Setelah mengetahui hasil referendum yang menghasilkan kemenangan untuk Brexit, Cameron mengumumkan pengunduran diri (Dhingra et al, 2016).

### **III. KAJIAN TEORITIS ATAS ALASAN INGGRIS MELAKUKAN BREXIT**

Keputusan Inggris untuk menarik diri dari UE tentunya memiliki alasan-alasan yang mendorong terjadinya keputusan tersebut. Seperti yang penulis kutip dari *Washingtonpost.com* (25 Juni 2016) berikut beberapa alasan Inggris keluar dari keanggotaan Uni Eropa yang mencakup alasan politik, ekonomi, hingga sosial:

- a. Bergabung dengan UE mengancam kedaulatan Inggris. Mereka yang skeptis dengan UE menganggap cabang eksekutif UE, yang disebut Komisi Eropa, tidak bertanggung jawab langsung kepada pemilih di Inggris. Padahal, di satu sisi UE memiliki otoritas terhadap negara anggotanya.
- b. UE ibarat ‘mencekik’ Inggris dengan aturan-aturan yang terlalu ‘pukul rata’. Sebagai konsekuensi Inggris bergabung dengan UE, tidak jarang perubahan aturan atau hukum mestilah mendapatkan ‘lampu hijau’ dari UE. Padahal, UE terdiri dari berbagai negara yang memiliki cara pandang berbeda atas berbagai masalah.
- c. UE justru memuluskan jalan untuk kepentingan korporasi dan menghalangi reformasi radikal. Ada istilah, “Uni Eropa anti demokrasi dan ‘tidak dapat tersentuh’ reformasi”. UE menyediakan

- ekosistem paling ramah di negara-negara maju untuk perusahaan monopoli rente, elite yang menghindari pajak, dan kejahatan terorganisasi.
- d. Euro sebagai Mata uang EU dianggap sebagai ‘bencana’. Euro dituduh sebagai penyebab utama Spanyol dan Yunani masih memiliki tingkat pengangguran di atas 20 persen pasca *resesi global* pada tahun 2008 lalu. Inggris sendiri mempertahankan mata uang poundsterling selama menjadi anggota EU.
  - e. EU membuka pintu besar-besaran untuk kaum imigran. Dalam aturan UE, seorang warga negara anggota UE berhak melakukan perjalanan, hidup, dan mengambil pekerjaan di negara-negara Uni Eropa lain. Sebagai gambaran, disebutkan pada tahun 2015 lalu, Inggris menerima 333.000 orang baru.
  - f. Dampak dari alasan kelima, Inggris diyakini bisa menciptakan sistem yang lebih rasional terkait imigrasi ini, ketika mereka keluar dari Uni Eropa.
  - g. Pada sektor keuangan, Inggris menyetorkan kontribusi sebesar 13 miliar poundsterling per tahun untuk UE. Keluar dari UE diyakini oleh para pendukung *Brexit* akan membuat uang kontribusi tersebut bisa digunakan untuk kepentingan negara.

Dari alasan-alasan Inggris yang dikemukakan di atas, jika kita telaah dari sudut pandang keilmuan Hubungan Internasional terdapat pergeseran sudut pandang yang dilakukan Inggris yang semula menggunakan pendekatan Neofungsionalisme ke Realisme. Neofungsionalisme menurut (Haas dan Schmitter, 1964) percaya bahwa integrasi akan terjadi jika tiga komponen pendukung: (a) kondisi latar belakang, (b) kondisi proses dan (c) kondisi yang memungkinkan untuk mendorong atau menghambat perluasan dalam bentuk pelimpahan sebagian kewenangan. Dalam konteks latar belakang, integrasi pertama dapat terjadi pada negara-negara demokrasi liberal dengan ekonomi kapitalis yang maju. Kondisi proses menuntut jaringan erat pertukaran ekonomi, perdagangan, migrasi tenaga kerja, pariwisata dan arus bebas faktor-faktor produksi. Kondisi pelimpahan sebagian kewenangan disebut sebagai *spillover*. *Spillover* ditandai dengan adanya keterkaitan antara sektor-sektor yang berbeda yang berfungsi sebagai pengikat transmisi integrasi (misalnya perdagangan bisa mengarahkan pada peningkatan koordinasi kebijakan moneter, atau ada kebijakan moneter yang sama), atau bisa mengandalkan hubungan-hubungan taktis antar sektor oleh agen-agen dalam proses tawar-menawar (misalnya pasar tunggal dengan kebijakan struktural) (Carporaso dan Keeler, 1993: 31).

Dari sisi realisme, yang memandang kedaulatan sebuah negara sebagai suatu hal yang penting, saya kira cukup sesuai dengan alasan yang

dikemukakan Inggris diatas. Realisme memandang integrasi regional mungkin terdengar sebagai sebuah *oxymoron* (Carlsnaes et all, 2004: 1009). Realisme menampilkan dirinya sebagai kemenangan politik atas ekonomi, kekuasaan dan keamanan atas pertukaran ekonomi, konflik atas kerjasama, dan negara atas proses ekonomi dan sosial yang sifatnya transnasional. Preferensi sebuah negara untuk melakukan integrasi ditentukan oleh posisi negara tersebut dalam sistem internasional, yaitu posisinya dalam distribusi kekuatan internasional, dalam konteks ini Inggris menilai dirinya sebagai salah satu negara yang kuat dalam distribusi kekuatan internasional hal ini terbukti Inggris menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Jika dilihat dari sudut pandang Realisme, terlihat Inggris tidak percaya lagi dengan integrasi yang dilakukannya dengan Uni Eropa. Hal tersebut sejalan dengan logika Realisme yang memiliki dua elemen kunci struktur sistemik adalah anarki dan distribusi kekuasaan internasional. Anarki menghasilkan ketidakpercayaan dan membuat setiap negara rentan terhadap penipuan negara lain. Menurut realisme, pertukaran ekonomi dapat membuat mitra lebih kuat dalam kapasitas militer mereka, perdagangan terjadi dengan hanya resiko tinggi bagi keamanan suatu negara. Melalui perdagangan, suatu negara dapat memperoleh lebih dari yang lain dan mungkin saja negara tersebut menggunakan sebagian keuntungannya untuk tujuan keamanan. Meskipun memang kondisi anarki ini tidak cukup menjelaskan semuanya, tetapi paling tidak menurut penulis mendekati pada kondisi Inggris saat ini dengan alasan-alasan yang dikemukakannya ketika membuat keputusan untuk keluar dari keanggotaan Uni Eropa.

### **3.1. Dampak Positif dan Negatif *Brexit* Bagi Inggris**

Sebuah keputusan tentunya akan memiliki dampak pada dua sisi, seperti sebuah *paradox*, di satu sisi akan membawa dampak positif dan di sisi lain akan menimbulkan dampak negatif. Pilihan Inggris untuk keluar dari keanggotaan Uni Eropa, penulis kira telah melalui pertimbangan dan perhitungan yang matang tentang konsekuensi yang akan dihadapi Inggris paska *Brexit*. Dalam bagian ini penulis akan memberikan gambaran tentang dampak Positif dan Negatif yang akan diterima Inggris paska *Brexit* yang didasarkan pada dua teori Hubungan Internasional yang telah penulis kemukakan pada bagian terdahulu yakni Neofungsionalisme dan Realisme.

Dampak positif tentunya akan dilihat dari sisi Realisme, dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Inggris untuk keluar dari keanggotaan Uni Eropa, maka menurut hemat penulis, dampak positif bagi Inggris, sebagai berikut:

- a. Inggris berdaulat penuh atas kebijakan yang akan dilakukan tanpa campur tangan cabang eksekutif UE, yang disebut Komisi Eropa.

- b. Inggris terbebas dari aturan-aturan UE yang dianggap ‘mencekik’ dan ‘pukul rata’. Sehingga pembuatan kebijakan tidak perlu mendapatkan ‘lampu hijau’ dari UE.
- c. Inggris terlepas dari kepentingan korporasi khususnya korporasi dalam tubuh UE, sehingga meminimalkan atau mengurangi monopoli rente yang dilakukan oleh korporasi, elite yang menghindari pajak, dan kejahatan terorganisasi.
- d. Inggris tetap dapat membuat kebijakan fiskal dan moneter sendiri dengan tetap mempertahankan mata uang poundsterling, meskipun selama menjadi anggota EU, Inggris pun tetap mempertahankan mata uangnya.
- e. Inggris dapat menciptakan sistem yang lebih rasional terkait imigrasi, sehingga mampu mengurangi imigran yang dianggap meresahkan dengan segudang permasalahan yang menyertai, seperti kejahatan dan menurunnya standar lingkungan.
- f. Inggris dapat menghemat 13 miliar poundsterling per tahun yang biasanya dsetorkan untuk UE, sehingga uang tersebut dapat digunakan untuk kepentingan negara.

Dampak negatif tentunya akan dilihat dari sudut pandang neofungsionalisme, menurut pandangan penulis dengan mengutip dari (Paper Brexit 01-07, CEP, LSE, London), dampak negatif bagi Inggris paska keluar dari keanggotaan Uni Eropa, sebagai berikut:

- a. Turunnya perdagangan antara Inggris dengan UE, hal tersebut disebabkan oleh akan munculnya *tariff dan non-tariff barriers* yang lebih tinggi. Sehingga akan menurunkan pendapatan Inggris sebesar 2,3%.
- b. Turunnya FDI (*Foreign Direct Investments*) yang akan masuk ke Inggris. Seperti diketahui saat ini terdapat kurang lebih 1 Triliun Poundsterling dan sekitar 50% dari jumlah tersebut berasal dari negara-negara anggota UE.
- c. Turunnya produktivitas Inggris (GDP) dalam pengembangan ekonomi sebagai akibat dari akan menurunnya FDI.
- d. Dalam konteks keimigrasian, dengan keluarnya Inggris dari UE, Inggris akan kehilangan tenaga kerja terdidik berusia muda yang berasal dari negara-negara anggota UE dibandingkan tenaga kerja lokal Inggris yang kurang terdidik, hal tersebut disebabkan oleh rendahnya tingkat kelahiran di Inggris dan menyebabkan kurangnya angkatan kerja, sehingga alasan persaingan tenaga kerja lokal dengan migran sebetulnya tidak memiliki argumen yang kuat. Di sisi lain pekerja migran juga memberikan lapangan kerja baru, karena

tentunya mereka menggunakan uangnya untuk konsumsi barang dan jasa di Inggris.

- e. Turunnya standar hidup di Inggris, hal ini disebabkan akan naiknya harga barang dan jasa seperti transportasi, makanan, minuman, dan pakaian. Dampak terberat akan dirasakan oleh masyarakat Inggris yang tergolong dalam lapisan bawah atau miskin.

Hal diatas merupakan prediksi dan penulis kira akan menarik untuk dicermati dalam perkembangan Inggris paska *Brexit* selanjutnya.

### **3.2. Dampak Positif dan Negatif *Brexit* Bagi Eropa dan Dunia Serta Indonesia**

Pada era globalisasi ekonomi yang disertai dengan kondisi saling ketergantungan, perubahan di suatu negara tentunya akan berdampak pada negara lain maupun kondisi dunia secara umum. Keluarnya Inggris dari keanggotaan UE pada 23 Juni 2016 lalu tentunya juga akan membawa dampak positif maupun negatif bagi Eropa dan Dunia. Pada bagian tulisan ini akan disampaikan dampak positif maupun negatif bagi Eropa dan Dunia sebagai berikut:

### **3.3. Dampak Bagi Eropa**

#### **3.3.1. Anggaran Ekonomi**

Negara anggota Uni Eropa lain harus mengisi setidaknya setengah kekurangan dari hilangnya kontribusi dana Inggris kepada Uni Eropa. Total kontribusi Inggris untuk anggaran Uni Eropa pada 2016 adalah 19,4 miliar euro. Inggris menerima sekitar 7 miliar euro dari subsidi regional dan pertanian. Jerman, negara anggota Uni Eropa terbesar, mau tak mau harus menyediakan uang tunai ekstra untuk menutupi celah ini. Dana yang dibutuhkan untuk ini diperkirakan mencapai 2,5 miliar euro. Uni Eropa akan menurunkan perkiraan produk domestik bruto (PDB) sebesar 0,5-1,0% dari saat ini yang sebesar 1,6% (koransindo.com, 29 Juni 2016).

#### **3.3.2. Perdagangan**

Negara-negara anggota Uni Eropa mengalami surplus neraca perdagangan sekitar 100 miliar euro dalam perdagangan dengan Inggris. Nilai ekspor Inggris lebih besar 20 miliar euro ketimbang nilai impornya. Kondisi serupa juga berlaku di bidang jasa keuangannya. Faktor ketidakpastian akan memengaruhi permintaan domestik dan melemahkan mata uang poundsterling. Kondisi ini berimplikasi terhadap ekspor Uni Eropa ke Inggris yang nilainya sekitar 2,6% dari total PDB Uni Eropa pada 2014 (koransindo.com, 29 Juni 2016).

### **3.3.3. Investasi**

Inggris merupakan destinasi penanaman modal asing Uni Eropa terbesar. Menurut data dari UNCTAD, rata-rata penanaman modal asing di Inggris mencapai USD56 miliar per tahun pada periode 2010-2014. Sekitar 72% investor menyatakan bahwa akses memasuki pasar tunggal Uni Eropa merupakan faktor utama penanaman modal mereka di Inggris (koransindo.com, 29 Juni 2016).

### **3.3.4. Imigrasi**

Berbagai kebijakan soal imigran di Inggris akan mengalami perubahan drastis. Jumlah imigran di Inggris pada 2015 mencapai 333.000 orang, selalu naik 100.000 setiap tahunnya sejak 1998. Dengan keputusan Inggris keluar dari Uni Eropa, para ekspatriat Eropa di Inggris terancam dideportasi. Brexit juga mengancam 1,2 juta pekerja imigran Inggris yang datang dari negara-negara Eropa Timur. Menurut data Reuters 2014, para pekerja imigran di Inggris berasal dari Polandia (853.000 pekerja), Rumania (175.000) dan Lithuania (155.000) (koransindo.com, 29 Juni 2016).

### **3.3.5. Dampak Bagi Dunia**

Inggris adalah salah satu mitra utama Amerika dalam perdagangan, sehingga perubahan monumental ini akan menimbulkan ketidakpastian dalam masa depan hubungan itu, terutama jika Inggris mengalami resesi. IMF memperingatkan bahwa Brexit dapat menurunkan output ekonomi banyak negara, termasuk AS hingga mencapai setengah persen. Akibatnya, nilai euro atau poundsterling akan terpuruk di bawah dolar. Ini akan menjadi pukulan kuat bagi eksportir AS. Sementara itu, di luar hubungan ekonomi, Amerika Serikat juga patut khawatir dengan ketidakstabilan politik pasca-Brexit terjadi. Tidak menutup kemungkinan, sejumlah negara lain akan mengikuti jejak Inggris meninggalkan blok perdagangan terbesar di dunia, melemahkan Eropa secara keseluruhan termasuk mengancam masa depan NATO. Sementara di sisi lain, bayang-bayang Rusia mengintai (Global.liputan.com, 24 Juni 2016). Menurut Dana Moneter Internasional (IMF) keluarnya Inggris dari Uni Eropa bisa memperburuk prospek perekonomian global yang selama ini masih mengalami pelambatan. Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD), organisasi kerja sama beranggotakan negara-negara berpendapatan tinggi mengingatkan, brexit bakal mengancam ekonomi Inggris dan pemulihan ekonomi global. Lembaga Global Counsel menilai ada 10 dampak brexit yakni dampak pada perdagangan intra-Eropa, investasi langsung, liberalisasi dan regulasi, kebijakan industri, imigrasi, jasa keuangan, kebijakan perdagangan, pengaruh global, anggaran dan ketidakpastian yang diakibatkan dampak-dampak tersebut (Ebell dan Warren, 2016).

### **3.3.6. Dampak Bagi Indonesia**

Menurut Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo dampak Brexit terhadap Indonesia tidak terlalu signifikan karena hubungan ekonomi dan perdagangan Indonesia dengan Inggris tidak terlalu besar. Inggris hanya berada di urutan keempat bagi Indonesia dalam hal besaran nilai perdagangan dengan UE. Mengutip catatan Kementerian Perdagangan, neraca perdagangan antara Indonesia-Inggris sampai Mei 2016 masih mengalami surplus sebesar USD159,74 juta, dengan nilai ekspor Indonesia ke Inggris tercatat USD364,63 juta dan impor sebesar USD204,89 juta. Nilai investasi Inggris di Indonesia sepanjang triwulan pertama 2016 mencapai USD54,87 juta dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 6.927 tenaga kerja. Berdasarkan data BPS, rata-rata porsi nilai ekspor nonmigas Indonesia ke Inggris hanya 1,2% dari total nilai ekspor nonmigas Indonesia ke seluruh dunia. Pada 2015, nilai ekspor nonmigas Indonesia ke Inggris sebesar USD1,53 miliar atau 1,16% dari total ekspor nonmigas Indonesia yang sebesar USD131,73 miliar. Pada 2015, Inggris berada di urutan ke-21 negara tujuan ekspor nonmigas Indonesia. Pada triwulan I 2016, ekspor nonmigas Indonesia ke Inggris sebesar USD364 juta atau 1,2% dari total ekspor nonmigas Indonesia ke seluruh dunia. Rata-rata porsi ekspor Indonesia ke Uni Eropa terhadap total ekspor adalah 10%. Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), investasi langsung (foreign direct investment) Inggris di Indonesia pada 2015 sebesar USD503 juta atau 1,71% dari total PMA senilai USD29,27 miliar (koransindo.com, 29 Juni 2016).

## **IV.MASA DEPAN INGGRIS RAYA (ENGLAND, WALES, SKOTLANDIA DAN IRLANDIA UTARA) PASKA BREXIT**

Banyak pengamat mengungkapkan bahwa peristiwa *Brexit* merupakan awal dari tercerai berainya Inggris Raya. Inggris Raya terdiri dari England, Wales, Skotlandia dan Irlandia Utara. Menteri Besar Skotlandia Nicola Sturgeon mengatakan hasil referendum ini "secara demokratis tak dapat diterima" karena Skotlandia memilih untuk tetap bergabung dengan Uni Eropa. Sturgeon mengatakan referendum kemerdekaan yang kedua "sangat mungkin" dilaksanakan. Dua mantan perdana menteri Inggris, Sir John Major dan Tony Blair awal bulan Juni ini memperingatkan bahwa keluar dari Uni Eropa "akan merusak kesatuan" Inggris Raya (Purdue, 2015).

Bagi Irlandia Utara, Wakil Menteri Besar Martin McGuinness mengatakan dampaknya terhadap Irlandia Utara "akan sangat dalam" dan keseluruhan Irlandia harus dapat memilih reunifikasi. Namun Menteri Besar Arlene Foster mengatakan hal ini tidak akan terjadi. Referendum yang diselenggarakan pada tanggal 23 Juni adalah untuk memutuskan apakah Inggris harus keluar atau tetap dalam Uni Eropa. Yang memilih keluar atau yang disebut Brexit mencapai 52% sementara yang tetap 48%. Mereka yang

menggunakan hak suaranya mencapai 71,8% dengan lebih dari 30 juta orang yang memilih, jumlah terbesar sejak pemilu tahun 1992. England memilih Brexit dengan angka 53,4%-46,6% begitu juga dengan Wales. Skotlandia dan Irlandia Utara memilih untuk tetap bersama Uni Eropa.

Dari uraian diatas penulis setuju bahwa adanya perbedaan pendapat dalam konteks fenomena *Brexit* akan memicu adanya perpecahan dalam Inggris Raya, Hal tersebut disebabkan masing-masing wilayah dari Inggris Raya memiliki kepentingan serta kebutuhan yang berbeda. Inggris Raya tidak akan bercerai berai jika Inggris mampu memberikan jaminan kepada Skotlandia dan Irlandia Utara bahwa Inggris mampu menjaga kondisi politik, ekonomi dan sosial yang sama minimal, atau lebih baik dibandingka bergabung dengan Uni Eropa, tetapi tentunya hal tersebut akan membutuhkan strategi kebijakan dan tentunya membutuhkan waktu, kita lihat saja bagaimana perkembangan selanjutnya.

## **V. SIMPULAN**

Fenomena referendum Brexit sebagai tonggak sejarah keluarnya Inggris dari Uni Eropa, dimana belum pernah ada negara anggota yang keluar sebelumnya, tentunya memberikan dampak yang sangat luas bagi Inggris sendiri, Inggris Raya dan tentunya Dunia. Pilihan Inggris untuk keluar dari keanggotaan Uni Eropa tentunya harus kita hormati, tetapi jika ditinjau dari sudut keilmuan Hubungan Internasional hal tersebut dapat dimaknai sebagai sebuah penemuan makna kembali dari perspektif Realisme yang sudah lama dianggap usang dan saat ini Inggris lebih memilih mengutamakan kedaulatan negaranya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Caporaso, J. A., & Keeler, J. T. (1993). *The European Community and regional integration theory*. Department of Political Sciences, University of Washinton.
- Carlsnaes, W., Risse-Kappen, T., Risse, T., & Simmons, B. A. (Eds.). (2002). *Handbook of international relations*. London: Sage.
- Dagnis Jensen, M., & Snaith, H. (2016). When politics prevails: the political economy of a Brexit. *Journal of European Public Policy*, 1-9.
- Dhingra, Swati, Gianmarco Ottaviano, Thomas Sampson, and John Van Reenen. "The impact of Brexit on foreign investment in the

UK." *Centre for Economic Performance (CEP), London School of Economics and Political Science (LSE)* (2016).

Ebell, M., & Warren, J. (2016). The long-term economic impact of leaving the EU. *National Institute Economic Review*, 236(1), 121-138.

Haas, E. B., & Schmitter, P. C. (1964). Economics and differential patterns of political integration: Projections about unity in Latin America. *International Organization*, 18(04), 705-737.

Krasner, S. D. (1999). *Sovereignty: organized hypocrisy*. New Jersey: Princeton University Press.

Purdue, D., Huang, H., & Economics, N. T. M. A. (2015). Brexit and its Impact on the Irish Economy. *National Treasury Management Agency, Dublin*.

Ševčíková, M. (2016). Analysis of The Main Causes of Brexit and Its Potential Consequences. *on European Integration 2016*, 961.

Paper Brexit 01. (2016). CEP. London: LSE.

Paper Brexit 02. (2016). CEP. London: LSE

Paper Brexit 03. (2016). CEP. London: LSE

Paper Brexit 04. (2016). CEP. London: LSE

Paper Brexit 05. (2016). CEP. London: LSE

Paper Brexit 06. (2016). CEP. London: LSE

Paper Brexit 07. (2016). CEP. London: LSE

Koransindo.com, 29 Juni 2016.

Global.liputan.com, 24 Juni 2016.

SindoNews.com, 24 Juni 2016.

Washingtonpost.com, 25 Juni 2016.